

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>1</sup> Desa merupakan wilayah yang berada dibawah kekuasaan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desa memiliki posisi sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut telah mengembangkan paradigma dan konsep baru mengenai tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang ini menjadikan posisi Desa sebagai etalase negara, tidak lagi berada di posisi paling belakang. Dirumuskannya Undang-Undang Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena diletakkan

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. 2017. hlm.1

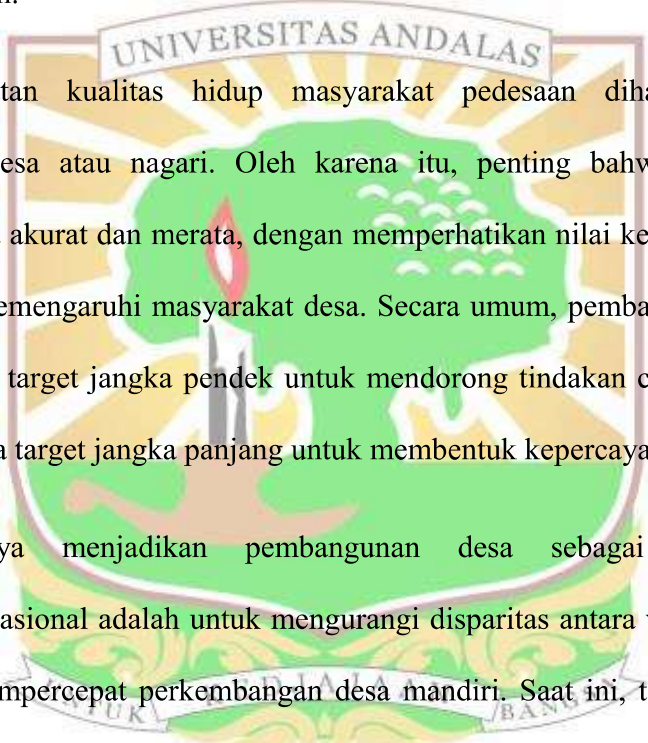
di posisi yang jarang dilirik atau diperhatikan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan ditetapkannya undang-undang desa ini:<sup>2</sup>

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- e. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional.

---

<sup>2</sup> Desa Sarimekar. 2021. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diakses dari <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/1/3/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa> pada 03 Mei 2023 pukul 23.00 WIB.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan inisiatif Program Nawa Cita ketiga, yang bertujuan untuk mengembangkan Indonesia dari wilayah pinggiran serta meningkatkan keberdayaan daerah-daerah dan desa dalam konteks kesatuan negara. Pembangunan desa menjadi suatu aspek yang krusial, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.<sup>3</sup>

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow background with a sunburst pattern. Below the tree, there is a stylized figure of a person. At the bottom of the shield, another banner contains the motto "SIKAP BANGSA, BANGSA BANGUN".

Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan diharapkan melalui pembangunan desa atau nagari. Oleh karena itu, penting bahwa pembangunan dilakukan secara akurat dan merata, dengan memperhatikan nilai keadilan agar dapat secara efektif memengaruhi masyarakat desa. Secara umum, pembangunan memiliki dua fokus, yaitu target jangka pendek untuk mendorong tindakan cepat dan konkret masyarakat, serta target jangka panjang untuk membentuk kepercayaan diri sendiri.<sup>4</sup>

Pentingnya menjadikan pembangunan desa sebagai fokus utama Pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi disparitas antara wilayah desa dan kota dengan mempercepat perkembangan desa mandiri. Saat ini, terjadi pergeseran paradigma dalam upaya pembangunan desa, di mana pendekatan tersebut melibatkan pemberian kewenangan berdasarkan prinsip pengakuan dan subsidiaritas.<sup>5</sup> Proses pembangunan desa dilakukan dengan memberikan pengakuan resmi dan legalitas terhadap keberadaan desa, dengan tujuan menciptakan desa yang mandiri dan

---

<sup>3</sup> Borni Kurniawan, 2015, *Desa Mandiri Desa Membangun: buku 5*, Kemendes PD TT, 2015, hlm.11.

<sup>4</sup> Inta P.N Damanik, 2007, "Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Agrofestri*, 2 (1):1

<sup>5</sup> Boni Kurniawan, OP. Cit, hlm.9

berbasis pada kearifan lokal. Harapan setelah disahkannya UU tentang pembangunan desa adalah tercapainya kesejahteraan secara merata oleh masyarakat dan juga dapat mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 . Hak otonom dapat membantu desa dan nagari dalam membangun sumber daya yang dimiliki dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* Akuntabel, Transparan dan Partisipatif.

Guna mendorong percepatan pembangunan antar desa, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang kompetisi desa dan kelurahan. Regulasi ini mengindikasikan perlunya dorongan agar desa-desa bersaing dalam melakukan pembangunan melalui kompetisi sehat dalam kegiatan lomba yang diorganisir oleh pemerintah. Tujuan dari penyelenggaraan kompetisi desa ini adalah untuk menilai status pencapaian pembangunan suatu desa serta mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat masyarakat. Selain itu, kompetisi ini juga bertujuan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing desa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila..<sup>6</sup>

Fenomena pengelolaan pemerintahan merupakan subjek penelitian yang menarik dan telah diselidiki, salah satunya oleh M. Fachri Adnan dan rekan-rekannya dengan judul penelitian "Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Nagari dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Sumatera Barat." Dalam penelitian ini, para peneliti membahas dampak program kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk

---

<sup>6</sup> Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pasal 2

Desa Mita (IbDM) terhadap tantangan yang dihadapi oleh Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Metode partisipatif digunakan, yang menekankan keterlibatan semua peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pemerintah Nagari Kamang Hilia dan Kamang Mudiak dapat merumuskan pedoman tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan panduan tersebut, dan melaksanakan pemantauan secara mandiri sesuai dengan panduan tersebut.

Penelitian yang sama tentang tata kelola pemerintahan juga dilakukan oleh Abdul Akhfar dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan bahwa penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa belum berjalan dengan baik dimana ada beberapa buku administrasi yang tidak diterapkan dan tidak lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi desa. Selanjutnya peneliti juga menjelaskan faktor-faktor penghambatnya berupa komunikasi dan pendampingan belum dilakukan secara rutin dalam hal sumber daya maupun dari keterampilan perangkat desanya.

Berdasarkan beberapa rujukan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini seperti penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada aspek partisipasi masyarakat saja dan faktor-faktor penghambat dari terwujudnya tata kelola pemerintahan di desa/nagari.

Kemudian penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih memfokuskan pada penerapan tiga prinsip *good governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif dalam tata kelola pemerintahan Nagari Kinali. selanjutnya, penelitian ini juga dilandasi dari pengamatan peneliti terkait prestasi yang diraih oleh Nagari Kinali pada perlombaan HUT RI ke-77.<sup>7</sup> Nagari kinali meraih juara umum lomba K-3 dan lomba Gapura di Pasaman Barat. Padahal nagari kinali memiliki wilayah yang cukup luas dan masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Tentunya perlu sebuah kerja sama dan komitmen sehingga tercapainya prestasi yang diinginkan. Menurut penjelasan di atas peneliti berasumsi bahwa tata kelola pemerintahan Nagari Kinali sudah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip *good governance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam membangun desa berprestasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus adanya upaya dan usaha serta kerja keras dari berbagai pihak. Kerja keras yang dimaksud adalah antara kepala desa dan aparatnya, serta masyarakat dan tokoh-tokohnya melakukan usaha dalam memajukan desa tersebut sehingga berprestasi dalam segala bidang sehingga kehidupan masyarakat di desa maju dan berkembang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dan

---

<sup>7</sup> Roni. 2022. “ HUT RI Ke-77 Nagari Kinali Juara Umum Lomba K-3 dan Gapura di Pasbar. diakses dari <https://marapipost.com/index.php/2022/08/18/hut-ri-ke-77-nagari-kinali-juara-umum-lomba-k-3-gapura-pasaman-barat/> pada 12 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB.

sentosa. Oleh karenanya, membangun desa yang berprestasi merupakan hal yang penting bagi kepala desa dan masyarakat desa.<sup>8</sup>

Membangun desa berprestasi adalah mengembangkan masyarakat desa yang memiliki kepribadian secara komprehensif yang meliputi makna-makna esensial yang diperlukan sebagai masyarakat yang dapat mempersiapkan agar memiliki tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan tuhan.<sup>9</sup> Disamping itu diperlukan juga nilai-nilai yang dapat mengikat dan menjaga ketertiban serta kerukunan dalam lingkungan masyarakat nagari seperti nilai toleransi, gotong-royong dan nilai lainnya. Hal tersebut tentunya sangat perlu bagi pemerintah Nagari Kinali dengan karakteristik masyarakatnya yang heterogen.

Pemerintah Nagari Kinali dan masyarakat harus saling bersinergi untuk menciptakan pembangunan dan menjadikan nagari menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian didukung juga dengan akses pelayanan prima yang diberikan oleh pihak pemerintah nagari kepada masyarakat karena dari hal tersebut akan memupuk rasa kepercayaan dan simpati masyarakat nagari.

Salah satunya sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Nagari Kinali:

---

<sup>8</sup> H.A. Tabrani Rusyan, 2018, *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 23

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27

“Prinsip Kita di kantor Wali Nagari Kinali ini yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Nagari Kinali. Hal tersebut kami mulai dari hal kecil seperti ketika masuk jam kerja sampai waktu pulang kami akan tetap stay menunggu untuk melayani masyarakat walaupun keadaan kantor sepi jadi ketika masyarakat datang ke kantor mereka tidak kehilangan untuk mencari kami. Kemudian ketika keadaan kantor ramai, karena kita memiliki penduduk yang cukup padat juga sampai dalam sehari itu kita mengeluarkan seratus buah surat. Kabar baiknya alhamdulillah masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang kita berikan”.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, melihat pada aspek tata kelola pemerintahan nagari berdasarkan prinsip *good governance* di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Selain menjadi juara umum pada lomba K-3 dan Gapura tingkat Kabupaten Pasaman Barat, nagari kinali juga memperoleh prestasi mewakili PKK Pasaman Barat untuk mengikuti lomba PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat.<sup>11</sup> Kemudian disamping prestasi Nagari Kinali dalam lomba PKK, Nagari Kinali juga meraih prestasi terbaik juara 1 lomba kategori Transparansi Dana Desa tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Wali Nagari Kinali Syahrial mengatakan:

“ Keberhasilan mendapat juara 1 kategori pengelolaan dana desa ini berkat kerja keras semua perangkat nagari serta dukungan semua elemen masyarakat, sehingga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik”.<sup>12</sup>

Memulai dengan menggalakkan pentingnya partisipasi masyarakat nagari agar terwujudnya pembangunan, wali Nagari Kinali menggelar kegiatan *Coffee Morning*

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan dengan Bagus selaku Kasi Pemerintahan Nagari Kinali tanggal 10 Mei 2023 Pukul 14.10. WIB, di kantor wali Nagari Kinali.

<sup>11</sup> Rhian DKincail. 2022. "Nagari Kinali Wakili Pasbar Pada Penilaian Lomba PKK Tingkat Provinsi Sumbar". diakses dari <https://www.portalberitaeditor.com/nagari-kinali-wakili-pasbar-pada-penilaian-lomba-pkk-tingkat-provinsi-sumbar/> pada 12 Oktober pukul 01.30 WIB

<sup>12</sup> Mata Sumbar, 2020, "Nagari Kinali Raih Juara 1 Kategori Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar" diakses dari <http://matasumbar.com/nagari-kinali-raih-juara-i-kategori-transparansi-dana-desa-tingkat-sumbar/> pada 05 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.



sebagai bentuk evaluasi kinerja sepekan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pj wali Nagari Kinali beserta perangkat nagari, seluruh da'I nagari se Nagari Kinali, seluruh kepala jorong Kenagarian Kinali dan tokoh adat masyarakat. Uniknya, acara ini dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja pemerintah nagari selama sepekan. Pada kegiatan tersebut seluruh lapisan masyarakat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi memberikan saran dan usulan untuk kemajuan Nagari Kinali. Selain itu juga bermanfaat untuk komunikasi dan juga dapat memecahkan masalah yang muncul mulai dari tingkat kejurong hingga kenagarian.<sup>13</sup>

Harapannya pertemuan sekali sepekan itu tidak ada permasalahan yang tidak selesai, karena semua terbuka termasuk juga menyusun perencanaan untuk kegiatan berikutnya, dan juga membahas isu-isu yang berkembang ditengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan *coffee morning* ini, setiap ada informasi dari kabupaten ke pemerintah nagari terhadap kegiatan apa saja, masyarakat segera dapat informasi karena semua stake holder dan pemangku hadir dan mengikuti, dan malah turut serta memberikan masukan demi kelancaran pembangunan di Nagari Kinali.<sup>14</sup>

Salah satu fenomena yang sangat menarik dari nagari kinali adalah dengan volume penduduk yang cukup padat dan wilayah geografis yang luas, nagari kinali dapat dengan baik mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mereka miliki. Hal itu dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Nagari

<sup>13</sup> Marapipost, 2021, “Hebat! Wali Nagari Kinali Gelar Coffee Morning, Evaluasi Kinerja Sepekan” diakses dari <https://marapipost.com/index.php/2021/09/18/hebat-wali-nagari-kinali-gelar-coffee-morning-evaluasi-kinerja-sepekan/> pada 17 Mei 2023 pukul 21.00 WIB

<sup>14</sup> *Ibid*

Kinali baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Peneliti menilai ini adalah suatu hal yang menarik, karena jika dibandingkan dengan nagari lainnya yang memiliki wilayah yang tidak terlalu luas nagari tersebut masih jauh tertinggal dari Nagari Kinali. Kemudian hal inilah yang membuat peneliti tertarik dalam meneliti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

**Tabel 1.1**  
**Kepadatan Penduduk Berdasarkan Nagari di Kecamatan Kinali**

No	Nagari	Luas (KM2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Katiagan	95,04	3.842	—
2.	<b>Kinali</b>	<b>387,60</b>	<b>66.820</b>	—
	Kecamatan Kinali	482,64	70.662	146,41

*Sumber Sekunder* : BPS Kabupaten Pasaman Barat

Untuk mengelola sebuah nagari dengan penduduk yang cukup padat tentunya memerlukan sinergitas dan diperlukannya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prestasi yang diraih oleh Nagari Kinali menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Namun dalam hal tersebut tidak terlepas dari peran dari tiga aktor penting yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah nagari mempunyai tugas utama untuk mewujudkan kemandirian nagari dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Kemandirian juga bisa didorong dengan membangun hubungan yang

selaras dan harmonis dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.<sup>15</sup>

**Tabel 1.2**  
**Luas Daerah Menurut Nagari di Kecamatan Kinali**

No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1.	Katiagan	95,04	19,69
2.	<b>Kinali</b>	<b>387,60</b>	<b>80,31</b>
	Kecamatan Kinali	482,64	100

*Sumber Sekunder* : BPS Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 80% dari luas kecamatan kinali itu adalah wilayah geografis pemerintah Nagari Kinali. idealnya untuk sebuah nagari memang sangat luas, akan tetapi pemerintah nagari cukup baik dalam mengelola dan menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat Nagari Kinali hal itu telah terbukti dengan prestasi-prestasi yang telah diperoleh.

Pembahasan kali ini untuk melihat bagaimana tata kelola pemerintahan yang dilakukan pada Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan dalam pelaksanaannya sendiri apakah masih terdapat pejabat dan staf pemerintahan nagari yang masih tidak memahami kinerja atau mekanisme dalam mengelola pemerintahan yang baik, pengetahuan mengenai mekanisme ini diperlukan agar para pejabat atau aparat pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan dalam melakukan pengambilan keputusan maupun kebijakan. Pihak stakeholder pemerintah nagari lainnya perlu juga memahami sub tugas dari masing-masing mereka karena

<sup>15</sup> Syamsurizaldi, dkk. 2018. Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016. *Jurnal Pembangunan Nagari* 3 (1): 88

pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dilandasi dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Maka permasalahan di atas dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan nagari berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam Ilmu Politik yang memfokuskan pada Tata Kelola Pemerintahan Desa/Nagari, terutama dalam konteks studi *good governance*. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait tata kelola pemerintahan desa yang berhasil di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa/Nagari.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Desa/nagari di Indonesia agar dapat melaksanakan pemerintahan nagari yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Terutama pada 3 indikator utama menurut Loina Lalolo Krina:

a. Akuntabilitas

Prestasi sebuah nagari merupakan gambaran bahwa tata kelola yang baik. Hal itu didukung dengan pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat nagari kepada pemerintah nagari. Nagari Kinali dapat mewujudkannya dalam perumusan keputusan, penyusunan RKP, APB nagari, dan pelaporan LKKPN tiap tahun anggaran secara tepat waktu.

b. Transparansi

Keterbukaan adalah suatu keharusan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemegang kekuasaan. Sebagai pengawasan juga agar tidak ada penyelewangan. Nagari Kinali memberikan akses keterbukaan kepada masyarakatnya dengan pembedaan *website*, facebook, dan Instagram nagari sehingga mereka dapat memperoleh informasi serta apa kegiatan pembangunan yang dilakukan. Kemudian didukung dengan pembuatan baliho Anggaran Dana Desa dan APB nagari yang dipajang di kantor dan tempat umum.

c. Partisipasi

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Interaksi yang aktif antara pemerintah dengan masyarakat adalah jembatan awalnya. Partisipasi masyarakat Nagari Kinali yang aktif didukung oleh peran dari pemerintahnya mulai dari perumusan keputusan, pelaksanaan sampai kepada tahap evaluasi masyarakat selalu diikuti sertakan dalamnya.

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk kebaikan dan kemajuan pemerintah nagari/desa yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih maju dan berprestasi dalam mengelola sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya.

